

Pendampingan Peningkatan Pelayanan Ketenagakerjaan Desa Muyoarjo Berbasis Platform Digital

Wiwik Wahyuni^{1*}, Indra Febrianto¹, Robby Wijaya¹

¹Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Email : ^{1*}wiwik.wahyuni.ft@um.ac.id

Abstrak – Pengabdian ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Desa Muyoarjo, Kecamatan Lawanf, Kabupaten Malang melalui simulasi implementasi model Desa SIAPkerja. Model ini disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di desa. Melalui proses pemetaan, terungkap bahwa desa memiliki potensi SDA di sektor pertanian dan pariwisata yang dapat dioptimalkan. Selain itu, SDM di desa juga memiliki potensi untuk mengaplikasikan model Desa SIAPkerja sebagai alternatif untuk meningkatkan kesempatan kerja di kalangan masyarakat desa. Rancangan program Desa SIAPkerja disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Program ini memiliki empat skenario yang mencerminkan kondisi di dunia kerja saat ini, yaitu: 1) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, 2) calon tenaga kerja berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, 3) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, dan 4) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengelolaan Desa SIAPkerja berada di bawah tanggung jawab pemerintah desa yang bekerja sama dengan pihak terkait. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas pelaksanaan program dengan dukungan dari karang taruna dan POKDARWIS desa sebagai pelaksana program Desa SIAPkerja.

Kata Kunci: Padat Karya, Pelayanan Desa, Pemberdayaan Desa, Pengangguran

Abstract – This dedication aims to help address employment issues in Muyoarjo Village, Lawanf District, Malang Regency through a simulated implementation of the SIAPkerja Village model. This model is tailored to the characteristics and potential of the Natural Resources (SDA) and Human Resources (SDM) available in the village. Through the mapping process, it was revealed that the village has potential in the agricultural and tourism sectors that can be optimized. Additionally, the human resources in the village also have the potential to apply the SIAPkerja Village model as an alternative to enhance job opportunities among the local community. The SIAPkerja Village program is designed based on the needs and potentials present in the village. The program consists of four scenarios reflecting current employment conditions: 1) incompetent prospective workers with available job opportunities, 2) competent prospective workers with available job opportunities, 3) incompetent prospective workers with unavailable job opportunities, and 4) incompetent prospective workers with available job opportunities. The management of SIAPkerja Village falls under the responsibility of the village government in collaboration with relevant parties. The village government plays a role in supervising program implementation with support from the youth organization (karang taruna) and the village's POKDARWIS (Tourism Awareness and Environmental Care Group) as the implementers of the SIAPkerja Village program.

Keywords: Labor-Intensive Work, Village Services, Village Empowerment, Unemployment

1. PENDAHULUAN

Berangkat dari jumlah penduduk usia kerja yang mencapai lebih dari 205 juta dimana terdapat lebih dari 8 juta jiwa merupakan pengangguran serta terdapat lebih dari 15 juta jiwa perlu dipersiapkan untuk menjadi Angkatan Kerja yang berkompeten. Angka tersebut didukung dengan adanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dari beberapa provinsi yang tersebar di Indonesia, Bali menjadi provinsi yang memiliki TPAK tertinggi dimana hal ini menunjukkan ketersediaan Angkatan Kerja yang tinggi di provinsi tersebut [1]. Selain itu, angka TPAK di perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Angka ini berarti bahwa semakin banyak angkatan kerja yang berpotensi untuk dimaksimalkan di daerah perdesaan [2], [3].

Disisi lain, nilai *Employment to Population Ratio* (EPR) perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Angka EPR perdesaan mencapai 68,36% yang berarti bahwa dari 100 penduduk umur 15 tahun keatas terdapat 68 orang yang bekerja [1]. Hal ini menunjukkan sinyal yang baik jika di bandingkan dengan nilai EPR di perkotaan yang hanya mencapai 60,4%. Namun provinsi yang sebelumnya memiliki TPAK tertinggi, tidak disertai dengan nilai EPR yang tinggi [4]. Jika di lihat

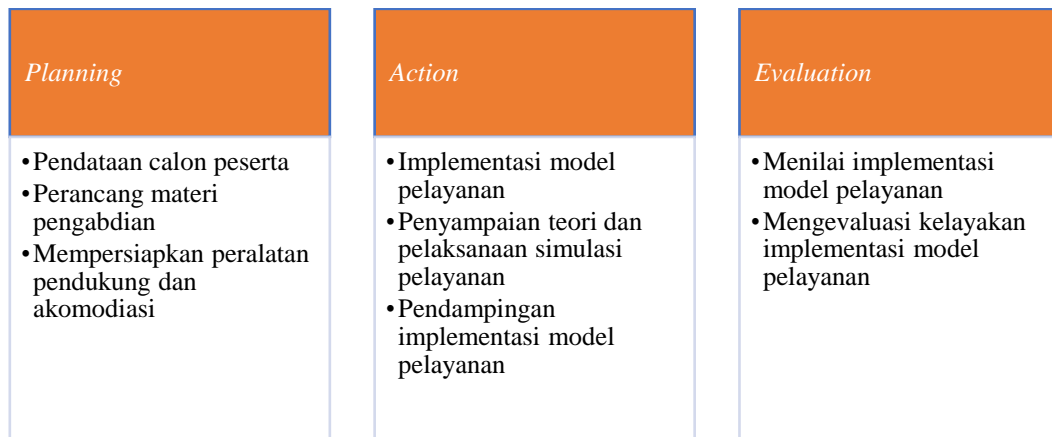
dari jenis pekerjaannya, Perdesaan menyumbang angka terbanyak untuk jenis pekerjaan paruh waktu dibanding dengan perkotaan. Hal ini menciptakan tantangan untuk Angkatan Kerja di pedesaan agar lebih dimaksimalkan melalui jenis pekerjaan yang terampil dan terlatih diluar dari pekerja paruh waktu. Selain itu terdapat ketimpangan pembangunan industri antara perkotaan dan pedesaan yang juga perlu menjadi perhatian khusus [5], [6].

Dari peta persebaran industri di Indonesia, hanya di dominasi di wilayah Jawa Barat yang banyak berlokasi di Kab karawang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan persebaran industri di wilayah lain yang berdampak pada pemerataan pembangunan di pedesaan, dan sebaran tenaga kerja [7]. Untuk itulah perlu adanya identifikasi demografi masyarakat pedesaan agar potensi yang ada di Angkatan kerja wilayah pedesaan dapat dioptimalkan dan sesuai dengan permintaan tenaga kerja di Industri. Hal inilah yang menjadi latar belakang perlu adanya wadah untuk mengidentifikasi potensi setiap daerah agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan strategi optimalisasi tenaga kerja untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di pedesaan dan pemerataan sebaran tenaga kerja pedesaan.

Dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan akan tercipta sebuah Desa Siapkerja yang merupakan program percepatan pemerataan sebaran tenaga kerja dan pemerataan pertumbuhan industri dari skala mikro sampai skala makro untuk membuka perluasan kesempatan kerja di Desa khususnya desa yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Maka dari itu kita akan melakukan kajian mengenai Desa Siapkerja sebelum nantinya akan di implementasikan pada Desa yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi payung bagi pencari kerja dan pemberi lapangan kerja. Untuk itu peneliti ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi layanan apa saja yang dapat diberikan di Desa-desa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

2. METODE PELAKSANAAN

Dalam merelaisasikan program ini, maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:

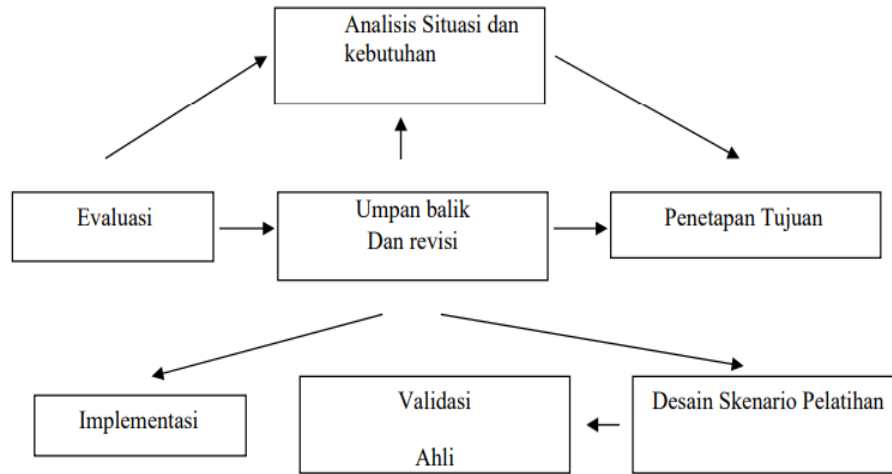


Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Dalam pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan partisipasi mitra dalam mengatasi persoalan dengan rincial sebagai berikut:

- 1) Perangkat Desa, sebagai mitra utama untuk implementasi model pelayanan desa siap kerja
- 2) Masyarakat Desa Muyoarjo, Kec. Lawanf, Kab Malang sebagai sasaran untuk penerima manfaat dari model yang di kembangkan.

Gambaran Penerapan Ipteks



Gambar 2. Penerapan Ipteks

Rincian dari penerapan IPTEKS dapat dijelaskan pada rincian dibawah ini;

1. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan masyarakat dalam pelaksanaan program pengabdian serta membuat daftar kebutuhan yang diperlukan selama implementasi program.
2. Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk mengimplementasikan model pelayanan Desa Siap Kerja untuk mengurangi pengangguran yang ada di Desa
3. Mendesain skenario pengabdian yang dilaksanakan secara terarah dengan memberikan materi dan simulasi implementasi model pada masyarakat dengan menggunakan media terkait
4. Implementasi/pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan Langkah-langkah berikut:
 - a. Pemberian materi peningkatan padat karya di wilayah desa melalui implementasi model Desa Siap Kerja yang dikembangkan.
 - b. Perancangan pembuatan produk kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di lingkungan sekitar mereka melalui simulasi model
 - c. Pendampingan perintian produk kewirausahaan masyarakat melalui simulasi yang tersedia sebagai pionir untuk lahirnya bisnis baru bagi masyarakat desa
5. Evaluasi proses pengabdian sehingga dapat diimplementasikan bagi seluruh masyarakat yang lebih luas

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Rancangan dan Hasil Implementasi Model Desa Siap Kerja Sesuai Dengan Potensi SDA dan SDM Desa

Desa SIAPKerja akan menjadi payung bagi pencari kerja dan penyedia lapangan kerja baik yang berkompeten maupun yang tidak berkompeten. Program ini akan melibatkan 3 kementerian yaitu Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Koperasi dan UMKM dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pemilihan ketiga kementerian ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian dalam mendukung pengembangan pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia khususnya di Desa. Dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan, kolaborasi beberapa kementerian terkait memegang peran penting untuk menyediakan pendidikan formal, pelatihan informal dan lapangan pekerjaan [8]–[10]. Berikut masing-masing fungsi dari ketiga kementerian tersebut.

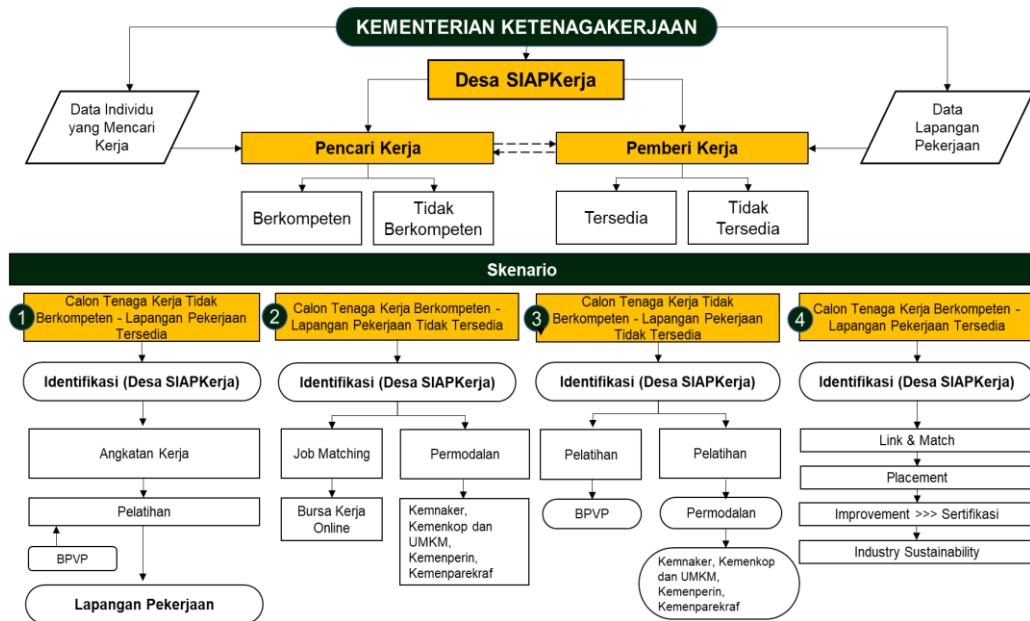
Fungsi dari masing-masing kementerian diataranya adalah:

1. Kementerian Ketenagakerjaan > Sebagai Operator dan Regulator program Desa SIAPKerja

serta sebagai penyedia pelatihan bagi SDM desa yang belum memiliki keterampilan dan kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri serta sebagai jembatan untuk memenuhi hak dan kewajiban pencari kerja dan penyedia lapangan kerja.

2. Kementerian Koperasi dan UMKM > Sebagai pihak yang meningkatkan kapasitas dan jumlah UMKM sebagai penyedia lapangan pekerjaan.
3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan > sebagai pihak yang mempersiapkan Bukan Angkatan Kerja yang masih sekolah dalam jangka panjang untuk menciptakan dan memenuhi kebutuhan Dunia Industri dan Dunia Kerja. (Job Seeker dan Job Creator).

Pada grand design Desa SIAPKerja terdapat 4 skenario yang berpeluang terjadi sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan.



Gambar 3. Rancangan Program Desa SIAPKerja

Skenario 1: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia

Kondisi calon tenaga kerja tidak berkompeten dapat diidentifikasi secara otomatis oleh sistem yang berbentuk Aplikasi Desa SIAPKerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Penggunaan Aplikasi dalam era revolusi industri 4.0 terbukti efektif untuk membantu pelaksanaan program [11]. Aplikasi tersebut berguna untuk mengetahui input data oleh masing-masing individu pada suatu desa yang dijalankan oleh operator yaitu pemerintahan desa. Ketersediaan lapangan kerja juga diketahui berdasarkan data update yang di input oleh pihak penyedia lapangan kerja seperti UMKM, industri dll. Dalam jangka pendek, calon tenaga kerja yang tidak berkompeten dan tergolong dalam usia angkatan kerja, akan dilakukan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dibawah naungan Kemnaker dengan kompetensi yang disesuaikan kebutuhan industri saat itu. Kesesuaian ketersediaan lapangan kerja dan kompetensi pencari kerja menjadi tujuan penting dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan [12].

Skenario 2: Calon Tenaga Kerja Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia

Ketika skenario 2 terjadi di lapangan, maka berdasarkan identifikasi sistem yang berbentuk Aplikasi Desa SIAPKerja stakeholder dapat mengetahui data dan fakta dan mengambil langkah kebijakan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui aktivitas *job matching* dan permodalan. Aktivitas *job matching* dilakukan melalui bursa kerja onling yang didalamnya juga terdapat pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha para pelaku usaha. Pelaksanaan pelatihan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan [13], [14]. Pelatihan diberikan dilakukan oleh 2 pihak yaitu; 1) Kemnaker melalui

Pemerintah Desa yang akan didorong untuk menjalankan program Bumi Desa yang selama sudah ada agar lebih optimal dan mampu menyerap kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dilokasi sekitar. 2) Kemenko UMKM didorong untuk melakukan pelatihan pengembangan atau pembukaan unit usaha baru kepada individu-individu yang berkompeten agar tidak lagi mejadi seorang *job seeker* tetapi juga seorang *job creator*. Selain itu juga akan di berikan dukungan permodalan sesuai dengan hasil identifikasi yang telah di lakukan sebelumnya. Dukungan permodalan ini dilakukan dengan kolaborasi beberapa kementerian diantaranya adalah Kemnaker, Kemenkop dan UMKM, Kemenperin, Kemenparekraf. Pemberian permodalan ini menjadi kebutuhan pokok dalam UMKM khususnya di desa dalam pengembangan usahanya [8], [12].

Skenario 3: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tidak Tersedia

Ketika skenario 3 terjadi di lapangan, maka berdasarkan identifikasi sistem yang berbentuk Aplikasi Desa SIAPkerja stakeholder dapat mengetahui data dan fakta dan mengambil langkah kebijakan agar mampu tercipta lapangan pekerjaan. Berbeda dari skenario 2, ketika suatu daerah tidak memiliki lapangan pekerjaan sama sekali, maka melalui pemerintah daerah, bisa menjadi inisiator pembentukan sebuah unit usaha seperti koperasi, kampung wisata dan berbagai macam unit usaha lain berdasarkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar melalui proses pelatihan. Pelatihan SDM terbaik yang ada dapat dilakukan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dibawah naungan Kemnaker atau bantuan dinas terkait lainnya untuk menjadi pioner pembuatan unit usaha baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar [15], [16].

Dari sisi Calon Tenaga Kerja, ketika belum memiliki kompetensi dengan angka pengangguran tinggi, maka dapat dilakukan identifikasi seperti pendidikan terakhir, pengalaman kerja dan demografi lainnya untuk melakukan pemetaan dan menyesuaikan kurikulum pelatihan yang akan diberikan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Selain peningkatan skill tenaga kerja, juga akan diberikan fasilitas permodalan untuk mendukung peningkatan usaha baru serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang akan di lakukan oleh kolaborasi beberapa kementerian diantaranya adalah Kemnaker, Kemenkop dan UMKM, Kemenperin, Kemenparekraf.

Skenario 4: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia

Skenario 4 adalah skenario yang paling ideal dan menjadi goal dari program Desa SIAPkerja, ketika calon tenaga kerja berkompeten dan lapangan pekerjaan tersedia. Kondisi ini dapat diketahui berdasarkan input data yang masuk di Aplikasi Desa SIAPkerja. Ketika data dari calon tenaga kerja dan penyediaan lapangan kerja telah teridentifikasi, maka dapat langsung dilakukan link & match berupa saran pekerjaan yang paling sesuai antara kompetensi dan ketersediaan sehingga memudahkan kedua belah pihak untuk mendapatkan kondisi terbaik [17]. Setelah itu, dapat dilakukan penempatan setiap calon tenaga kerja terhadap posisi/ jabatan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman yang dimiliki. Supaya proses ini dapat berjalan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan improvisasi dan *maintenance* lingkungan oleh stakeholder terkait [12], [14]. Stakeholder yang terlibat diantaranya adalah Kemenkop dan UMKM untuk selalu melakukan kontrol dan memastikan UMKM dan industri lain mengalami peningkatan kapasitas usaha dan kebutuhan tenaga kerja yang difasilitasi oleh berbagai macam kemudahan investasi maupun ekspansi bisnis dibawah kontrol kementerian dalam negeri, serta pelaksanaan program sertifikasi profesi yang akan di lakukan oleh Kemnaker untuk menjamin kompetensi dan portofolio tenaga kerja berkompeten. Jika kondisi ini dapat tercapai, maka akan tercipta industri sustainability di tiap-tiap daerah.

3.2 Pendampingan Pelayanan Ketenagakerjaan Desa berbasis Digital

Dalam menerapkan model pelayanan ketenagakerjaan desa berbasis digital, langkah awalnya melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang menjadi target program. Proses ini dimulai dengan pertemuan awal untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang tujuan, manfaat, dan implementasi teknis dari platform digital yang akan digunakan dalam pelayanan ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali pertemuan selanjutnya, tim pengabdian mengorganisir kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara mendalam kepada perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang dijadikan sasaran program. Pelatihan ini mencakup pengenalan platform digital, cara penggunaannya, serta langkah-langkah praktis dalam mencari pekerjaan atau mengunggah lowongan kerja.

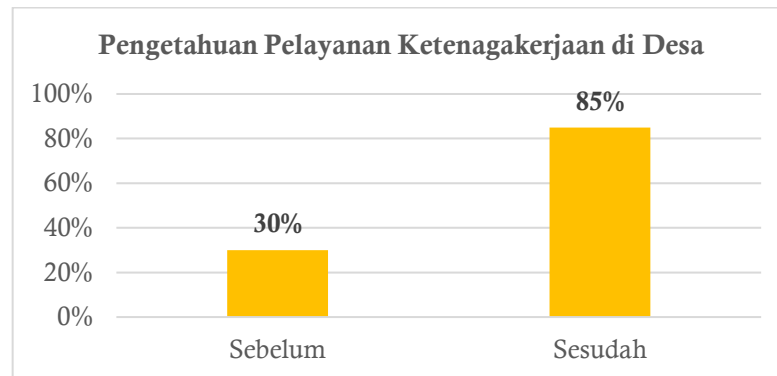


Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian

Tim pengabdian juga memfasilitasi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan bahwa perangkat desa dan masyarakat dapat memahami potensi dan manfaat penuh dari penggunaan platform digital ini. Dalam setiap pertemuan, pendampingan personal diberikan kepada masyarakat untuk membantu mereka dalam mengatasi kendala teknis atau pertanyaan terkait penggunaan platform. Pengabdian dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan perangkat desa dan masyarakat secara langsung. Selama pertemuan-pertemuan ini, aspek-aspek penting dari platform digital, seperti pembuatan profil pekerja, pencarian pekerjaan, dan interaksi dengan pengusaha lokal, diperkenalkan secara mendalam. Selain itu, tim pengabdian juga memfasilitasi sesi evaluasi untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pengalaman mereka dengan model pelayanan ketenagakerjaan berbasis digital. Evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap program, termasuk penyesuaian fitur platform, peningkatan pelatihan, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat secara aktif, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan pemahaman yang mendalam, meningkatkan keterampilan, dan memastikan adopsi yang maksimal dari model pelayanan ketenagakerjaan berbasis digital di tingkat desa.

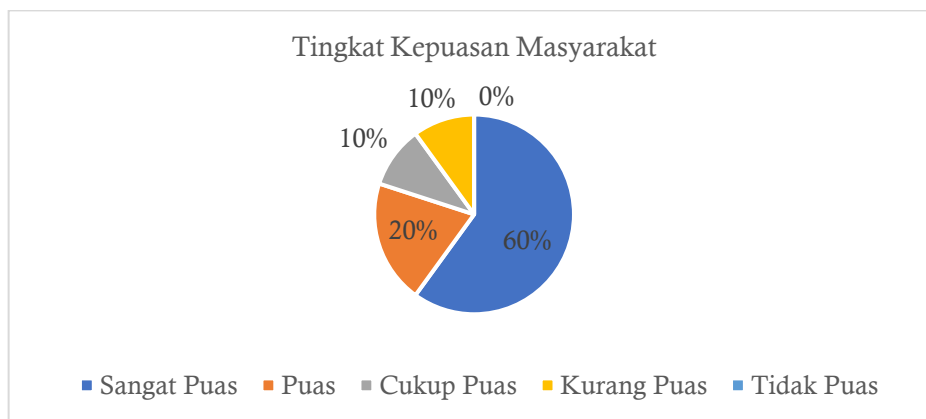
3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Setelah pengabdian selesai, dilakukan penyebaran angket untuk mengevaluasi pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Hasil evaluasi pelaksanaan pengabdian di Desa SIAPkerja menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan tentang pelayanan ketenagakerjaan di kalangan masyarakat desa. Sebelum pengabdian, hanya 30% dari responden yang memiliki pengetahuan yang memadai, sedangkan setelah implementasi model pelayanan Desa SIAPkerja, persentase tersebut meningkat menjadi 85%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendistribusikan informasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat desa terkait layanan ketenagakerjaan.



Gambar 7. Peningkatan Pengetahuan Mitra

Selain itu, melalui survei kepuasan, 60% mitra menyatakan sangat puas dan 20% mitra menyatakan puas terhadap kegiatan pengabdian ini. Mereka merasa bahwa Desa SIAPkerja berhasil memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam mencari pekerjaan dan mengembangkan potensi ekonomi di desa. Feedback positif ini menunjukkan bahwa pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat desa terhadap pelayanan ketenagakerjaan yang diterapkan.



Gambar 8. Survey Kepuasan Masyarakat

4. KESIMPULAN

Desa SIAPkerja di Desa Muyoarjo, Lawang, Malang disusun berdasarkan identifikasi ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan kurangnya kelangsungan program-program sebelumnya di desa. Desa ini mengandalkan potensi pertanian dan pariwisata sebagai solusi untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Program ini memiliki empat skenario, melibatkan calon tenaga kerja berkompeten atau tidak, dengan lapangan pekerjaan tersedia atau tidak. Pen gelolaannya di bawah tanggung jawab pemerintah desa bekerjasama dengan pihak terkait, dengan dukungan dari karang taruna dan POKDARWIS desa. Melalui simulasi implementasi di Desa Muyoarjo, masyarakat setempat mengalami peningkatan pengetahuan dan kepuasan terhadap pengabdian yang dilakukan. Harapannya, model Desa SIAPkerja dapat memberikan dampak positif dengan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

REFERENCES

- [1] Sakernas, "Survey Angkatan Kerja Nasional," 2021.
- [2] I. N. S. Arida and L. K. Pujani, "Kajian Penyusunan Kriteria-Kriteria Desa Wisata Sebagai Instrumen Dasar Pengembangan Desawisata," *J. Anal. Pariwisata*, vol. 17, no. 1, pp. 1–9, 2017.

- [3] S. R. Budiani *et al.*, "Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Komunitas di Desa Sembungan, Wonosobo, Jawa Tengah," *Maj. Geogr. Indones.*, vol. 32, no. 2, p. 170, 2018, doi: 10.22146/mgi.32330.
- [4] A. Budiyo; Suryana, "Analisis Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Jatinegara Jakarta Timur)," *J. Ilm. Plano Krisna*, vol. 14, no. 2, pp. 54–63, 2019.
- [5] C. Tennant, M. Boonkrong, and P. A. b. Roberts, "The design of a training programme measurement model," *J. Eur. Ind. Train.*, vol. 26, no. 5, pp. 230–240, 2002, doi: 10.1108/03090590210424902.
- [6] K. A. Demir, G. Döven, and B. Sezen, "Industry 5.0 and Human-Robot Co-working," *Procedia Comput. Sci.*, vol. 158, pp. 688–695, 2019, doi: 10.1016/j.procs.2019.09.104.
- [7] Haeruman, J. Herman, and Eriyatno, "Partnership in Local Economic Development," *Penerbit Yayasan Mitra Pembang. Desa-Kota dan Busines Inov. Cent. Indones. Jakarta.*, 2001.
- [8] N. Indra, "Peranan Koperasi dan UMKM Dalam Ketenagakerjaan Nasional Di Era New Normal 2022," *Pros. Semin. Nas.*, pp. 95–108, 2021.
- [9] A. I. Sulaiman, C. Chusmeru, and B. Kuncoro, "The Educational Tourism (Edutourism) Development Through Community Empowerment Based on Local Wisdom and Food Security," *Int. Educ. Res.*, vol. 2, no. 3, p. p1, 2019, doi: 10.30560/ier.v2n3p1.
- [10] R. M. Utami and D. C. Lantu, "Development Competitiveness Model for Small-Medium Enterprises among the Creative Industry in Bandung," *Procedia - Soc. Behav. Sci.*, vol. 115, no. Iicies 2013, pp. 305–323, 2014, doi: 10.1016/j.sbspro.2014.02.438.
- [11] A. Hidayatno, A. R. Destyanto, and C. A. Hulu, "Industry 4.0 technology implementation impact to industrial sustainable energy in Indonesia: A model conceptualization," *Energy Procedia*, vol. 156, pp. 227–233, 2019, doi: 10.1016/j.egypro.2018.11.133.
- [12] B. Arifin *et al.*, "Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia," *J. Rural Stud.*, vol. 79, no. September, pp. 382–394, 2020, doi: 10.1016/j.jrurstud.2020.08.052.
- [13] N. F. Krueger, M. D. Reilly, and A. L. Carsrud, "Competing models of entrepreneurial intentions," *J. Bus. Ventur.*, vol. 15, no. 5, pp. 411–432, 2000, doi: 10.1016/S0883-9026(98)00033-0.
- [14] S. W. Wong, "Urbanization as A Process of State Building: Local Governance Reforms in China," *Int. J. Urban Reg. Res.*, vol. 39, no. 5, pp. 912–926, 2015, doi: 10.1111/1468-2427.12250.
- [15] A. F. Sahroh, "Pengaruh Literasi Ekonomi Dan Tingkat Penggunaan Media Sosial Terhadap Minat Berwirausaha Mahasiswa Fakultas Ekonomi Di Universitas Negeri Surabaya," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 6, no. 3, pp. 208–215, 2018.
- [16] A. W. Febrian and Y. Suresti, "Pengelolaan wisata kampung blekok sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat berbasis community based tourism kabupaten situbondo," *J. Adm. Bisnis*, vol. 9, no. 2, pp. 139–148, 2020, doi: 10.14710/jab.v9i2.25308.
- [17] I. S. Rizkya Adzhura Puteri Setiawan, Trisna Insan Noor, Lies Sulistyowati, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Petani Kedelai Dengan Menggunakan Pendekatan Nilai Tukar Petani (Ntp) Dan Analysis the Prosperity of Soybean Farmers Using Approach Exchange Farmers Rate (Ntp) and Exchange Household Income (Ntrp)," *J. Agribisnis Terpadu*, vol. 12, no. 2, pp. 178–189, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jat/article/download/6779/4702>.